



## Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi

Tasya Imelda<sup>1</sup>, Alsi Shintia<sup>2</sup>, Widia Wati<sup>3</sup>, Putri Rizqia Julana<sup>4</sup>, Mariana Mariana<sup>5</sup>

Mahasiswa MKSP, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia<sup>1234</sup>

[alsishintia11@gmail.com](mailto:alsishintia11@gmail.com)<sup>1</sup>, [pshameisha587@gmail.com](mailto:pshameisha587@gmail.com)<sup>2</sup>, [widianatiksp@gmail.com](mailto:widianatiksp@gmail.com)<sup>3</sup>, [utririzkiajulana@gmail.com](mailto:utririzkiajulana@gmail.com)<sup>4</sup>, [mariana@pnl.ac.id](mailto:mariana@pnl.ac.id)<sup>5</sup>

Diserahkan tanggal 28 Nopember 2024 | Diterima tanggal 23 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2024

### Abstract:

*This study aims to analyze strategic steps in improving the efficiency and transparency of state budget management through the implementation of an accurate and structured accounting system. Budget management efficiency is important to ensure optimal resource allocation, while transparency is needed to strengthen accountability and increase public trust. The methodology used in this study is a literature review, by reviewing various scientific articles, books, and relevant reports that discuss topics related to accounting systems, information technology, and state budget transparency. The results of the study indicate that the implementation of a technology-based accounting system, such as the Regional Financial Information System (SIKD), and the standardization of accounting processes across government agencies can improve efficiency in budget management. In addition, transparency can be improved through the publication of open financial reports, the use of blockchain technology, and public involvement in budget supervision. In conclusion, the combination of the application of modern technology and public involvement is the key to creating efficient, transparent, and accountable state budget management.*

**Keywords:** Efficiency, Transparency, Accounting System, Budget Management.

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara melalui penerapan sistem akuntansi yang akurat dan terstruktur. Efisiensi pengelolaan anggaran menjadi penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal, sementara transparansi diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan relevan yang membahas topik terkait sistem akuntansi, teknologi informasi, dan transparansi anggaran negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan standarisasi proses akuntansi di seluruh instansi pemerintah mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, transparansi dapat ditingkatkan melalui publikasi laporan keuangan secara terbuka, pemanfaatan teknologi blockchain, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Kesimpulannya, kombinasi antara penerapan teknologi modern dan keterlibatan publik merupakan kunci untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** Efisiensi, Transparansi, Sistem Akuntansi, Pengelolaan Anggaran.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini merupakan bagian dari kewenangannya sebagai kepala pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas tersebut, kekuasaan ini didelegasikan kepada beberapa pihak, yaitu Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang di kementerian/lembaga yang dipimpinnya, serta Gubernur/Bupati/Walikota yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di daerah masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dijalankan secara terstruktur dan terkoordinasi, dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pihak-pihak lain yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menjalankan tugas tersebut (Dandung et al., 2020).

Di era reformasi, pemerintah Indonesia terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Upaya ini mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat (Kamasan et al., 2019). Salah satu langkah awal yang penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan berperan sebagai alat untuk mewujudkan *good governance* secara nyata. Melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan audit, pilar-pilar *good governance* dapat diterapkan secara konkret. Ketiga alat ini saling melengkapi dan bekerjasama untuk menciptakan sistem *check and balance* yang kokoh dalam proses ekonomi dan operasional sektor pemerintah. Penerapan *good governance* diharapkan dapat membantu Indonesia bangkit dari keterpurukan, dengan reformasi di bidang keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut (Manossoh et al., 2015).

Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan memainkan peran yang sangat vital dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Di tengah dunia yang semakin dinamis, pemerintah harus bijak dalam mengelola anggaran mereka. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Tomala et al., 2016).

Pendahuluan ini menggambarkan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara meningkatkan efisiensi dengan menerapkan sistem akuntansi yang akurat dan terstruktur, serta cara meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis referensi yang relevan terkait peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara melalui penerapan sistem akuntansi yang akurat dan terstruktur. Tujuan utama metode ini adalah mengidentifikasi temuan yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Mariana, 2024; Mariana & Safrizal, 2024; Rahmatullah et al., 2023).

Pencarian literatur dilakukan dengan kata kunci seperti sistem akuntansi pemerintahan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan transparansi anggaran, dengan fokus pada artikel yang diterbitkan antara 2011 hingga 2020 dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Artikel yang dipilih berbasis penelitian empiris atau analisis kebijakan yang relevan untuk pengelolaan keuangan negara. Kriteria seleksi memastikan bahwa sumber yang digunakan dapat diandalkan dan memberikan informasi yang efektif tentang sistem akuntansi dan kebijakan pengelolaan anggaran. Proses tinjauan pustaka dilakukan untuk menjaga akurasi dan menghindari plagiarisme (Hendra et al., 2024; Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Maulena et al., 2023; Wahyudi & Mariana, 2024; Zhul et al., 2024).

## **PEMBAHASAN**

### **Strategi Pengelolaan**

Pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam **\*\*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\*\***, mencakup seluruh proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Undang-undang ini mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya aset negara berupa uang maupun barang. Pengelolaan ini mencakup penerimaan dan pengeluaran baik pada tingkat negara maupun daerah, aset negara atau daerah berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainnya, termasuk aset pihak ketiga yang dikelola pemerintah untuk kepentingan publik, serta aset yang diperoleh melalui fasilitas pemerintah. (Dandung et al., 2020).

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara meliputi ketertiban, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga mengedepankan keadilan dan kepatutan dalam setiap pengelolaan. Proses pengelolaan keuangan negara melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan yang sistematis dan terukur, pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosedur hukum, penggunaan dana yang efektif dan efisien, hingga pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan serta pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh negara. Proses ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan nasional melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal, transparan, dan bertanggung jawab. (Dandung et al., 2020).

### **Implementasi Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Akuntansi, pada intinya, adalah pencatatan sistematis transaksi keuangan yang menghasilkan laporan bermanfaat bagi berbagai pihak. Sistem akuntansi yang handal, menghasilkan informasi tepat waktu dan akurat, akan meningkatkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Reformasi akuntansi sektor publik didorong oleh paradigma baru seperti akuntabilitas publik dan *value for money*, yang sejalan dengan *good governance*. Akuntansi berbasis akrual berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena meningkatkan pengawasan kinerja program dan proyek pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung desentralisasi (Manossoh et al., 2015).

Akuntansi Berbasis Akrual yang berhasil merupakan contoh implementasi akuntansi pemerintahan yang berhasil. Sistem ini memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah. Dengan mencatat transaksi berdasarkan saat terjadinya, bukan saat kas keluar masuk, akrual menghasilkan informasi keuangan yang lebih realistis. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk membuat perencanaan yang lebih baik, baik jangka pendek maupun panjang. Penggunaan akrual juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Informasi keuangan yang lebih akurat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga mendukung pengawasan yang lebih baik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat (Kamasan et al., 2019).

### **Penerapan Sistem Akuntansi yang Akurat dan Terstruktur untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Negara**

Penerapan sistem akuntansi yang akurat dan terstruktur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Sistem akuntansi yang dirancang dengan baik memastikan bahwa data keuangan dicatat, diproses, dan dilaporkan secara sistematis, sehingga meminimalkan kesalahan dan kebocoran anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dapat meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan data secara real-time, yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (EFRINA, 2023; Mamahit et al., 2017; Subhi & Yuhertiana, 2021).

Selain teknologi, standarisasi proses akuntansi di seluruh instansi pemerintah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Standarisasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Penelitian juga menekankan pentingnya pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem modern terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi teknologi akuntansi (Mayani et al., 2018; Saprudin, 2017). Dengan demikian, investasi dalam pelatihan SDM dan teknologi menjadi prioritas utama dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang efisien.

### **Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Negara Melalui Teknologi dan Partisipasi Publik**

Transparansi adalah elemen kunci dalam pengelolaan anggaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan transparansi adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka melalui portal daring. Publikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau pendapatan dan pengeluaran negara secara langsung, yang juga dapat mendorong pengawasan yang lebih efektif (Putri, 2018; Santi, 2015).

Teknologi blockchain juga berpotensi besar dalam mendukung transparansi. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi keuangan pemerintah secara aman dan dapat diverifikasi, sehingga meminimalkan risiko kecurangan (Debi Novalia et al., 2021; Sumayyah et al., 2023). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam mekanisme partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran (Sihombing & Sulistyono, 2021).

Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas. Kombinasi antara teknologi dan partisipasi publik menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan bebas dari praktik korupsi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara (Tahir et al., 2022).

## SIMPULAN

Pengelolaan keuangan negara yang efisien bergantung pada sistem akuntansi yang handal. Integrasi teknologi informasi modern, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dengan pelatihan yang memadai bagi para pengelola keuangan merupakan kunci keberhasilan. Standarisasi prosedur akuntansi di seluruh lembaga pemerintahan juga krusial untuk menjamin konsistensi data dan akurasi pelaporan. Dengan demikian, potensi kesalahan dan penyimpangan anggaran dapat diminimalisir, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur.

Transparansi menjadi pilar penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik. Publikasi laporan keuangan yang mudah diakses publik, penggunaan teknologi blockchain untuk mengamankan jejak transaksi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan anggaran (misalnya melalui musyawarah rencana pembangunan – musrenbang) merupakan langkah-langkah kunci. Upaya ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Jawa, Amtiran and Ndoen/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p167-178. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 167–178.
- Debi Novalia, Hidayatul Kahfi, & Rika Lidya. (2021). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus pada PT Bangkit Berkah). In *Jurnal Buana Akuntansi* (Vol. 6, Issue 1, pp. 57–66). <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i1.1353>
- EFRINA, L. (2023). Teknologi Informasi Dan Perannya Dalam Perubahan Organisasi Dan Fungsi Akuntansi Manajemen. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 394. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74891>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaL Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46.
- Mamahit, F. A., Sondakh, J., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Minahasa Selatan). In

- Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* (Vol. 8, Issue 1).  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15327>
- Manossoh, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara the Implementation of Governmental Accounting System To Initiate Good Government Governance in North Sulawesi Province. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 777.
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M. (2024). Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 61–70.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40.  
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Mariana, M., & Safrizal, S. (2024). Analisis Sistem Upah Pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82.  
<https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218>
- Maulena, M., Kheriah, K., & Abral, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(4), 81–89. [www.depkeu.com](http://www.depkeu.com)
- Mayani, N., Falatehan, A. F., & Wahyuni, E. S. (2018). Strategi Peningkatan Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. In *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* (Vol. 10, Issue 1).  
[https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i1.22708](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22708)
- Putri, D. P. S. (2018). Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Bagian Tata Kelola Keuangan Untuk Mewujudkan Smart City Di Dki Jakarta. In *Teknologi: Jurnal Ilmiah dan Teknologi* (Vol. 1, Issue 1, p. 43). <https://doi.org/10.32493/teknologi.v1i1.1416>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Santi, N. wayan A. (2015). Efektivitas Penerapan SIA Berbasis Komputer dengan Pendekatan DBMS pada KSP Asri Sari Utama Mandiri. In *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12769>
- Saprudin, S. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo). In *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* (Vol. 5, Issue 2).  
<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12756>

- Sihombing, M. J. S., & Sulisty, H. (2021). Pengaruh E-Commerce dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Berwirausaha. In *Jurnal Sosial Sains* (Vol. 1, Issue 4, pp. 309–321). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i4.78>
- Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Equity*, 24(2), 141–156. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>
- Sumayyah, S., Zahara, I., & Handayani, M. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 45–54.
- Tahir, Y., Said, D., & Usman, A. (2022). Pengaruh Investasi Teknologi Informasi dan Kemampuan Teknik personal terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. In *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* (pp. 23–32). <https://doi.org/10.26487/akrua.v15i1.20548>
- Tomala, J., Kuzma, M., & Mościcka, A. (2016). Discover the world ' s research. *Discover the World's Research*, 2016(1), 89.
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tahqiqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v18i2.228>
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>